

Peran sustainability report, dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Spesialisasi Industri KAP terhadap *audit report lag*

Devi Rosanita*, Syahril Djaddang, JMV. Mulyani

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pancasila

*Corresponding author: devirosanita@gmail.com

Abstract

Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies, the Financial Services Authority requires that every public company registered on the capital market must submit annual financial reports that have been audited by an independent auditor to the Financial Services Authority and announced to the public no later than the end of the fourth month after the year this is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number: 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports Through the Electronic Reporting System of Issuers or Public Companies. Companies that do not submit financial reports by the specified time limit will be subject to administrative sanctions. This study aims to determine the effect Good Corporate Governance namely the board of commissioners, independent commissioners, audit committee and Public accounting firm industry specialization audit report lag. the population in this study are manufacturing and mining companies listed on the IDX (Indonesian Stock Exchange) in 2021 period. There are 287 public companies listed on the Indonesia Stock Exchange which are registered as a population. Samples were selected using techniques purposive sampling, and a sample of 71 companies was obtained. This research model uses multiple regression analysis and moderation regression analysis or Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the study show that independent commissioners and Public accounting firm industry specialization have no effect on audit report lag, so that the size of the independent commissioner and Public accounting firm industry specialization will not add to the time span audit report lag, the board of commissioners and the audit committee have an effect on audit report lag, so that the more members of the board of commissioners and the audit committee will reduce the term audit report lag. Sustainability report able to moderate the independent commissioner against audit report lag, until it gets bigger sustainability report it will strengthen the relationship of independent commissioners to audit report lag and independent commissioners can be more effective in supervising management and ensuring that the audit process is carried out properly and on time. Future research can add to research in other fields so that more samples are studied..

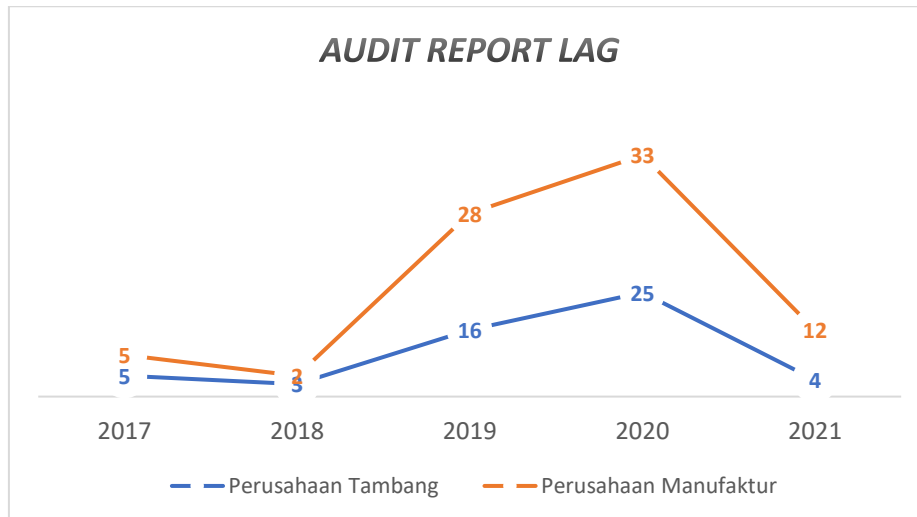
Keywords: uudit report lag, good corporate governance, public accounting firm industry specialization, sustainability report

PENDAHULUAN

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) Tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan adalah *timely*. Ketepatan waktu (*timely*) yaitu karakteristik yang akan menambah kegunaan atau relevanan informasi dalam laporan keuangan apabila laporan tersebut disampaikan tidak melebihi batas waktu yang diatur.

Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, OJK mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh auditor independen kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir hal ini diatur dalam peraturan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep/346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik kemudian di sempurnakan kembali dengan keluarnya Peraturan OJK Nomor: 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten Atau Perusahaan Publik. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sampai batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi

administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Bab XII pasal 63 huruf e yang menyatakan bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Penetapan dari sanksi administrasi tersebut sudah selayaknya membuat perusahaan sadar tentang pentingnya penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu.



Grafik 1. Jumlah Perusahaan Yang Terlambat dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Audit pada Tahun 2017-2021

Fenomena selama lima tahun terakhir membuktikan bahwa perusahaan di sektor pertambangan dan manufaktur masih ada yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan auditan. Namun demikian masih banyak perusahaan pertambangan dan perusahaan manufaktur yang menyampaikan laporan auditan sesuai prosedur dan tepat waktu dalam pelaporan. Menurut daftar yang diterbitkan oleh BEI dari tahun 2017-2021 pada tahun 2017 tercatat ada 5 pada perusahaan pertambangan dan ada 5 pada perusahaan manufaktur, tahun 2018 mengalami penurunan yaitu tercatat ada 3 pada perusahaan pertambangan dan ada 2 pada perusahaan manufaktur, tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu tercatat ada 16 pada perusahaan pertambangan dan ada 28 pada perusahaan manufaktur, tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu tercatat ada 25 pada perusahaan pertambangan dan ada 33 pada perusahaan manufaktur, tahun 2021 mengalami penurunan yaitu tercatat ada 4 pada perusahaan pertambangan dan ada 12 pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan auditan lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh OJK/Bapepam akan diberikan sanksi. Laporan keuangan yang terlambat juga akan mengganggu dan memperlambat pekerjaan auditor independen dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan pemeriksaan dan pemberian opini /pendapat dari hasil pemeriksaan tersebut (Prasetyo et al., 2020).

Laporan yang tersaji dengan tepat waktu menjadi salah satu penilaian dari *good corporate governance* yang baik. Namun tidak menutup kemungkinan akan adanya delay pada penyajian laporan terutama pada hasil audit. Merujuk pada teori kontingensi fenomena *audit report lag* yang terjadi di perusahaan dapat ditekan melalui peran mekanisme *good corporate governance*, yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit.

Faktor pertama yang mempengaruhi *audit report lag* yang terjadi di perusahaan dapat ditekan melalui peran mekanisme *good corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (POJK Nomor 33/POJK.04/2014). Salah satu fungsi dewan komisaris adalah menyeimbangkan kepentingan manajer dan para pemangku kepentingan (Al Daoud et al., 2015). Untuk bisa menyelaraskan kepentingan tersebut, diperlukan dewan komisaris yang independen yang tidak mempunyai keterikatan dengan manajemen atau perusahaan. Non-

eksekutif director atau komisaris independen adalah individu-individu dengan keahlian yang tepat yang tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen atau kemampuan untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham atau kemampuan untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham (Manurung, 2017). Faktor kedua yang mempengaruhi *audit report lag* yang terjadi di perusahaan dapat ditekan melalui peran mekanisme *good corporate governance* adalah komisaris independen merupakan Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komponen dari *good corporate governance* yang penting untuk ditelusuri adalah dewan komisaris independen, struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan institusional yang merupakan komponen dari mekanisme *good corporate governance* (Darmawang, et al., 2019). Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan bisa memberikan tekanan pada perusahaan untuk bisa mengungkapkan *sustainability report* dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan dan tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan (Naranjo et al., 2016). Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Naranjo et al., 2016) dimana semakin besar persentase Komisaris Independen maka dapat meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap kualitas pengungkapan dan mengurangi usaha menutupi informasi perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *audit report lag* yang terjadi di perusahaan dapat ditekan melalui peran mekanisme *good corporate governance* adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk untuk menunjang tugas dan fungsi dewan komisaris. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) komite audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Faktor keempat yang mempengaruhi *audit report lag* yang terjadi di perusahaan dapat ditekan melalui spesialisasi industri KAP (Kantor Akuntan Publik). Dalam mengendalikan reaksi pasar pada nilai perusahaan, diharapkan perusahaan dapat mengendalikan terjadinya *audit report lag*. Hal utama yang terjadi adalah bahwa *audit report lag* disebabkan karena adanya proses audit yang membutuhkan waktu. Proses audit yang mengakibatkan terjadinya *audit report lag* yang panjang dapat disebabkan karena terjadinya peristiwa didalam perusahaan, seperti pada perusahaan yang mengalami kerugian cenderung membutuhkan waktu lebih lama bagi auditor untuk memulai proses audit dari biasanya (Carslaw & Kaplan, 1991). Kejadian – kejadian yang dihadapi oleh perusahaan dan adanya perbedaan klasifikasi industri dapat berpengaruh pada terjadinya *audit report lag*, hal ini karena setiap industri memiliki kriteria tersendiri, seperti halnya perusahaan pada sektor keuangan, yang kebanyakan asetnya merupakan aset moneter sehingga lebih mudah untuk diukur (Meylisa, 2010). (Ratnaningsih & A.A.N.B.Dwinandra, 2016) menyatakan bahwa Auditor spesialisasi lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan apabila diberikan tugas audit yang sesuai dengan spesialisasi mereka. Seorang auditor spesialisasi akan mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam pada sebuah industri dibandingkan dengan auditor non-spesialisasi, sehingga dapat menemukan salah saji material dalam laporan keuangan dengan lebih baik dan mampu menciptakan proses audit yang efektif, serta menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan Big Four, akan mempersingkat audit report lag dan dapat diperkuat oleh adanya spesialisasi auditor sehingga audit report lag semakin pendek.

Riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan spesialisasi industri KAP terhadap *audit report lag* namun ada banyak penelitian dan pertimbangan masa lalu, Sehingga pengaruh variabel tersebut perlu diteliti kembali dengan menambahkan variabel *sustainability reporting* sebagai pemoderasi.

Setiap usaha didirikan untuk tetap terjaga kelangsungan usahanya (*going concern*). Informasi mengenai kelangsungan usaha penting terutama dalam kondisi keuangan tidak pasti, dan stakeholder mengharapkan adanya *early warning* pada kegagalan perusahaan, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab seorang auditor, karena auditor merupakan pihak yang menghubungkan kepentingan pihak principal dan agent. Opini auditor yang berkualitas akan memberikan pengambilan keputusan yang lebih

baik. Pemberian status *going concern* bukan tugas yang mudah, karena seringkali timbul masalah dalam diri auditor. Beberapa pertimbangan yang digunakan auditor dalam memberikan opini *going concern* yaitu *sustainability reporting*, pertumbuhan perusahaan, dan *good corporate governance* (Aditya, 2017). Dengan adanya konsep dimana para auditor juga perlu memberikan opini atas keberlangsungan usaha perusahaan yang diauditnya, maka disinilah sebuah *sustainability report* berperan. *Sustainability report* memiliki peran yang kuat dalam mengungkapkan dan menjelaskan kinerja perusahaan dilihat dari aspek sosial dan lingkungan. Mengingat tanggung jawab auditor bertambah, *sustainability report* dapat membantu auditor dalam memberikan opini atas *audit going concern*. Hal ini membuat auditor membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan perusahaan, terutama atas *audit going concern* (Nur Fitri & Dudy Satyawan, 2014). Fakta ini menunjukkan bahwa *sustainability report* dapat memoderasi antara *good corporate governance* dengan *Audit Report Lag*

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan pertambangan dan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian pada kajian ini, sehingga dapat diketahui apakah dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan KAP pada tahun 2021 berpengaruh terhadap *audit lag audit report lag* yang terjadi di perusahaan melalui peran *mekanisme good corporate governance*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana agar tidak terjadinya *audit report lag* dimasa yang akan datang.

TINJAUAN LITERATUR

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*

Teori dari hipotesis ini bertumpu pada teori agensi, dimana pihak pemilik (*principal*) termotivasi terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian, dan ketepatan waktu yang dilakukan oleh seorang manajer (*agent*). Pengaturan jumlah dewan komisaris diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan dan penasihatannya bisa berjalan dengan lebih baik dan efisien. Namun menyangkut koordinasi dan komunikasi, terdapat kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Kurangnya koordinasi dan komunikasi membuat kurang efisien serta sulit dalam memonitor, dibandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit. (Hilendri et al., 2018) berpendapat semakin banyak anggota dewan komisaris akan mengurangi jangka waktu *audit report lag*. Dengan adanya pembagian kerja yang baik maka tugas dewan komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi atau manajemen perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan dan nasihat dari dewan komisaris mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, karena merasa diawasi maka manajemen tertuntut untuk taat terhadap aturan, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pinayungan & Hadiprajitno, 2019), (Putri, 2019), (Maharsa, Agustinus Guntur., Darminto, Dwi Prastowo., & Merawati, 2021), (Irma, 2021), (Ds, 2016), (Hilendri et al., 2018), (Quraizhiy, 2022), (Ni Kadek Yeni Purnami, Putu Sukma Kurniawan, 2019).

H1: Diduga Dewan komisaris berpengaruh terhadap *audit report lag*

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag*

Komisaris independen tidak memiliki hubungan langsung dengan para direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang kepentingan perusahaan. Hal ini agar komisaris independen dapat bersikap independen dalam mengawasi sehingga dapat memberikan masukan yang efektif kepada manajemen. Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Ode et al., 2019), (Pinayungan & Hadiprajitno, 2019), (Arizky & Purwanto, 2018) (Quraizhiy, 2022), (Bakara & Siagian, 2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H2: Diduga Komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*

Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Banyaknya jumlah komite audit semakin meningkatkan kualitas pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil audit untuk menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian internal, termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Lebih banyak komite audit memudahkan untuk memantau operasi, yang dapat meningkatkan efisiensi pengendalian internal perusahaan, yang pada gilirannya menciptakan risiko audit yang lebih rendah. Rendahnya tingkat risiko audit akan mempengaruhi ruang lingkup audit suatu perusahaan sehingga mengurangi *audit report lag* (Ode et al., 2019). Jika suatu

perusahaan semakin banyak anggota komite audit maka semakin singkat juga audit delay pada perusahaan itu sendiri, karena ketika jumlah anggota komite audit meningkat, manajer memiliki kontrol yang lebih baik atas pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga auditor dapat melakukan proses audit tepat waktu (Purba, 2018). Eksistensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Jumlah komite audit juga harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan, hal ini dibuktikan dengan keseluruhan sampel yang menjadi objek pada penelitian ini memiliki keanggotaan komite audit minimal 3 (tiga) orang dimana telah sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 55/POJK.04 tahun 2014. Dengan demikian, semakin banyak keanggotaan komite audit yang dimiliki perusahaan maka akan memperpendek *audit delay* (Purba, 2018) hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sidharta & Nurdina, 2017), (Putri, 2019), (Quraizhiy, 2022), (Purba, 2018), (Muhammad Amin & Ibnul Jauzi Abdul Caesar, 2021), (Maharsa, Agustinus Guntur., Darminto, Dwi Prastowo., & Merawati, 2021), (Ode et al., 2019), (Hakim & Sagiyan, 2018), (Ni Kadek Yeni Purnami, Putu Sukma Kurniawan, 2019), (Saputra & Agustin, 2021) dan (Mutmainah, 2022) Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H3: Diduga Komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*

Pengaruh Spesialisasi Industri KAP terhadap *Audit Report Lag*

KAP spesialis industri merupakan KAP yang dikhususkan pada industri tertentu untuk dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas jasa audit. Keterlambatan pelaporan keuangan yang disebabkan oleh audit report lag dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu asimetris informasi antara agen dengan prinsipal. KAP spesialis industri mempunyai wawasan mendalam mengenai operasi serta karakteristik dari suatu industri, sehingga diprediksi mampu mengidentifikasi masalah pada klien dengan lebih cepat. Sistem laporan keuangan klien dapat dipahami dengan lebih cepat dan masalah akuntansi yang kompleks dapat lebih cepat diselesaikan (Makhabati & Adiwibowo, 2019). KAP spesialis diyakini bisa menuntaskan audit laporan keuangannya secara tepat waktu dibanding KAP bukan spesialis karena KAP spesialis lebih sering berhadapan dengan perusahaan yang industrinya sejenis sehingga lebih cepat menemukan kesalahan salah saji yang material, maka penggunaan jasa KAP spesialis akan lebih cepat mengerjakan proses audit laporan keuangan, sehingga dapat mempersingkat *audit report lag*. Hal tersebut akan menyebabkan audit report lag menjadi lebih pendek. Rusmin dan Evans (2017) membuktikan bahwa KAP spesialis industri mempengaruhi *audit report lag* secara negatif karena kualitas audit yang tinggi menyebabkan penundaan laporan audit menjadi lebih pendek sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arumningtyas & Ramadhan, 2019)

H4: Diduga Spesialisasi Industri Auditor berpengaruh terhadap *audit report lag*

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag* dengan *Sustainability Report* sebagai Variabel Moderasi

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan harus dapat memenuhi harapan dan kepentingan pemangku kepentingan, termasuk dalam penyediaan informasi yaitu *sustainability report* (Madona & Khafid, 2020). Semakin baik tata kelola perusahaan, semakin produktif tindakan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris akan mengurangi jangka waktu audit report lag. Dengan adanya pembagian kerja yang baik maka tugas dewan komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi atau manajemen perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan dan nasihat dari dewan komisaris mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, karena merasa diawasi maka manajemen tertuntut untuk taat terhadap aturan. Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan komisaris yang dipercaya sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengawasi perusahaan. Selain itu dewan komisaris merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan GCG sehingga dewan komisaris perlu mempublikasikan informasi mengenai tanggung jawab sesuai dengan salah satu prinsip GCG.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H5: Diduga *Sustainability Report* memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap audit report lag

Pengaruh Komisaris Independent terhadap *Audit Report Lag* dengan *Sustainability Report* sebagai Variabel Moderasi

Dengan adanya Komisaris Independen, tidak hanya dapat melindungi kepentingan pihak mayoritas tetapi juga pihak minoritas yang juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan, yang mana salah satu bentuk perlindungan kepentingan tersebut adalah melakukan pelaporan pertanggung jawaban sosial. Semakin baik tata kelola perusahaan, semakin produktif tindakan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Keefektifan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana komisaris independen dibentuk dan diorganisir. Kinerja komisaris independen yang baik akan mampu mewujudkan GCG bagi perusahaan. Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai telah berupaya menyampaikan seluruh informasi kepada para pemangku kepentingan termasuk laporan keberlanjutannya (*sustainability report*). Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

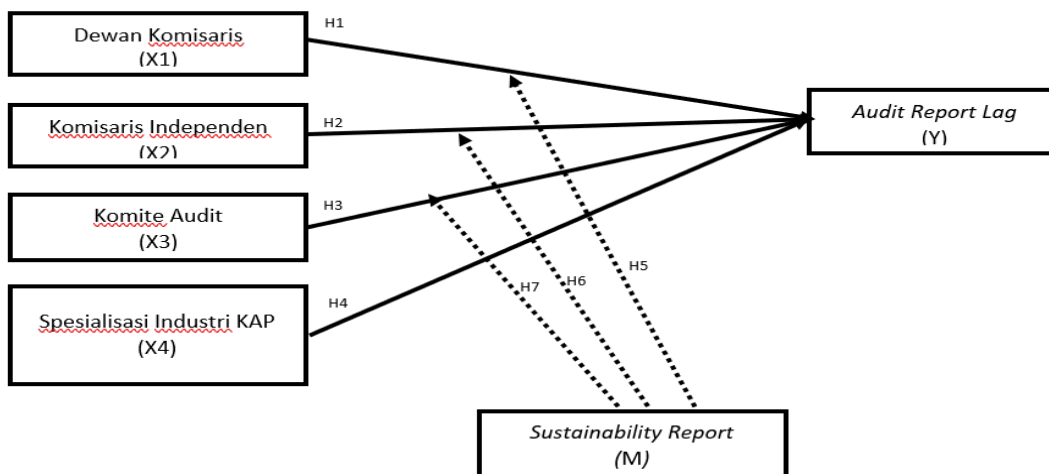
H6: Diduga *Sustainability Report* memoderasi pengaruh komisaris independent terhadap *audit report lag*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* dengan *Sustainability Report* Variabel Moderasi

Teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan lebih dari permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diharapkan oleh *stakeholder* (Fatchan & Trisnawati, 2018). Semakin baik tata kelola perusahaan, semakin produktif tindakan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Komite audit merupakan salah satu dewan pengawasan dari sistem *corporate governance* dalam sebuah perusahaan, Komite Audit juga mendukung tindakan akuntabilitas perusahaan sehingga informasi yang diberikan perusahaan lebih transparan baik informasi keuangan dan informasi non keuangan (Chariri, 2009). Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

H7: Diduga *Sustainability Report* memoderasi pengaruh komite audit terhadap audit report la

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021 yang terdiri dari 287 perusahaan.

Tabel 1. Penentuan Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Sampel
1.	Populasi: Perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021	287
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>Sustainability Report</i> dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2021.	(98)
3.	Perusahaan mengungkapkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian dengan tidak lengkap selama periode 2021	(118)
Jumlah perusahaan pertambangan dan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel		71

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 2. Tabel Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<i>Audit Report Lag</i> \	<i>Audit Report Lag</i> adalah jangka waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasar padawaktuyang dibutuhkan untuk mendapat laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Sidharta & Nurdina, 2017)	ARL = Tanggal Laporan Auditor - Tanggal Tutup Buku Perusahaan	Rasio
Dewan Komisaris	Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. (Hilendri et al., 2018)	DK = menghitung jumlah anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan	Rasio
Komisaris Independen	Proporsi dewan komisaris independen merupakan proporsi jumlah komisaris independen yang terdapat di dalam perusahaan sampel yang masuk ke dalam anggota komisaris perusahaan sampel. (Faris Quraizhy, Ahlik 2022)	KI = $\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio
Komite Audit	Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Hilendri et al., 2018)	KA = Jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan	Rasio
Spesialisasi industri KAP	KAP spesialis industri merupakan KAP yang dikhususkan pada industri tertentu untuk dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas jasa audit (Makhabati & Adiwibowo, 2019)	SIA= $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang diaudit KAP yang sama pada sub sektor industri}}{\text{Jumlah perusahaan pada sub sektor industri}}$ KAP dikatakan spesialis ketika KAP tersebut menghasilkan proporsi sama dengan atau lebih dari 15% dari total	Nominal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		perusahaan yang ada dalam industri itu, sedangkan KAP dapat dianggap tidak spesialis jika proporsi yang dihasilkan kurang dari 15%. KAP spesialisasi akan diberikan nilai 1, sebaliknya jika perusahaan tidak diaudit oleh KAP spesialisasi akan diberikan nilai 0.	
<i>Sustainability report</i>	<i>Sustainability reporting</i> merupakan laporan keberlanjutan mengacu pada jenis laporan perusahaan yang merinci kontribusi perusahaan kepada masyarakat dalam tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Oktaviani et al., 2023)	$SRDI_j = \frac{n}{k}$	Rasio

Sumber: Data diolah, 2022

Tahapan yang dilakukan pertama adalah analisis Statistik Deskriptif, Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas) dan uji hipotesis Moderated Regression Analysis (MRA), Uji Statistik t dan Uji Koefisien Determinasi).

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	ARL	DK	KI	KA	SIK	SR
Mean	87.33803	4.294366	0.432903	3.169014	0.295775	0.333227
Median	89.00000	5.000000	0.400000	3.000000	0.000000	0.306818
Maximum	151.0000	10.00000	0.800000	5.000000	1.000000	0.761364
Minimum	36.00000	2.000000	0.166667	1.000000	0.000000	0.045455
Std. Dev.	22.03500	1.915940	0.114063	0.5060253	0.459639	0.162757
Sum	6201.000	312.0000	30.736611	225.0000	21.00000	23.65909
Sum Sq. Dev.	22987.89	2569577	0.910730	21.97183	14.78873	1.854281
Observations	71	71	71	71	71	71

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil analisis pada tabel 2 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*

Audit Report Lag (Y)

Hasil uji statistik untuk *audit report lag* dari 71 perusahaan manufaktur dan pertambangan selama 1 tahun 2021 menunjukkan nilai minimum terdapat pada PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul yaitu 36 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai *audit report lag* yang paling rendah di antara perusahaan sampel. Nilai maksimum terdapat pada PT. Nusa Palapa Gemilang Tbk yaitu 151 yang artinya perusahaan tersebut memiliki nilai *audit report lag* yang paling tinggi di antara perusahaan lain yang menjadi sampel. Nilai rata-rata *audit report lag* adalah 87,33 sedangkan standar deviasi *audit report lag* adalah senilai 22,03 lebih kecil dari rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa *audit report lag* bersifat homogen. Terdapat 22 perusahaan yang masih bermasalah dalam melakukan penyampaian laporan keuangannya yaitu lebih dari 151 hari dan 49 perusahaan yang tidak mengalami *audit report lag*.

Dewan Komisaris (X1)

Hasil uji statistik untuk dewan komisaris dari 71 perusahaan manufaktur dan pertambangan selama 1 tahun (2021) menunjukkan nilai minimum terdapat pada PT. Impack Pratama Industri Tbk yaitu 2 yang

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki atau melaporkan nilai dewan komisaris yang paling rendah di antara perusahaan sampel. Nilai maksimum terdapat pada PT. Astra International Tbk yaitu 10 yang artinya perusahaan tersebut memiliki atau melaporkan nilai dewan komisaris yang paling tinggi di antara perusahaan lain yang menjadi sampel. Nilai rata-rata dewan komisaris adalah 4,29 sedangkan standar deviasi dewan komisaris adalah senilai 1,91, yang artinya terdapat 2 dewan komisaris yang tidak berfungsi.

Komisaris Independen (X2)

Hasil uji statistik untuk komisaris independen dari 71 perusahaan manufaktur dan pertambangan selama 1 tahun (2021) menunjukkan nilai minimum terdapat pada PT. Unilever Indonesia Tbk yaitu 1,67 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai komisaris independen yang paling rendah di antara perusahaan sampel. Nilai maksimum terdapat pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk yaitu 0,80 yang artinya perusahaan tersebut memiliki nilai komisaris independen yang paling tinggi di antara perusahaan lain yang menjadi sampel. Nilai rata-rata komisaris independen adalah 0,43 sedangkan standar deviasi komisaris independen adalah senilai 0,11. Komisaris independen dianggap tidak memiliki perannya dalam fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap dewan direksi pada perusahaan tersebut karena mungkin sedang pandemi Covid 19 pada tahun 2021.

Komite Audit (X3)

Hasil uji statistik untuk komite audit dari 71 perusahaan manufaktur dan pertambangan selama 1 tahun (2021) menunjukkan nilai minimum terdapat pada PT. Unilever Indonesia Tbk yaitu 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai komite audit yang paling rendah di antara perusahaan sampel. Nilai maksimum terdapat pada PT. Indika Energy Tbk yaitu 5 yang artinya perusahaan tersebut memiliki nilai komite audit yang paling tinggi di antara perusahaan lain yang menjadi sampel. Nilai rata-rata komite audit adalah 0,43 sedangkan standar deviasi komite audit adalah senilai 0,11.

Spesialisasi Industri KAP (X4)

Hasil uji statistik untuk spesialisasi industri KAP 71 perusahaan manufaktur dan pertambangan selama 1 tahun (2021) menunjukkan nilai minimum yaitu 0 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai spesialisasi industri KAP. Nilai maksimum yaitu 1 yang artinya memiliki nilai *sustainability report* yang paling tinggi. Nilai rata-rata spesialisasi industri KAP adalah 0,29 atau sekitar 30% sedangkan standar deviasi spesialisasi industri KAP adalah senilai 0,45. Spesialisasi Industri KAP dianggap peranya tidak ada pada perusahaan tersebut karena mungkin pandemi covid 19, sehingga 71% berasal industri yang lain selain pertambangan dan manufaktur yaitu makanan dan minuman, perbankan, dan lain lain.

Sustainability Report (M)

Hasil uji statistik untuk sustainability report menunjukkan nilai minimum terdapat pada PT. Nusa Palapa Gemilang Tbk yaitu 0,04 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai *sustainability report* yang paling rendah di antara perusahaan sampel. Nilai maksimum terdapat pada PT. Indika Energy Tbk yaitu 0,76 yang artinya perusahaan tersebut memiliki nilai *sustainability report* yang paling tinggi di antara perusahaan lain yang menjadi sampel. Nilai rata-rata sustainability report adalah 0,33 sedangkan standar deviasi sustainability report adalah senilai 0,16.

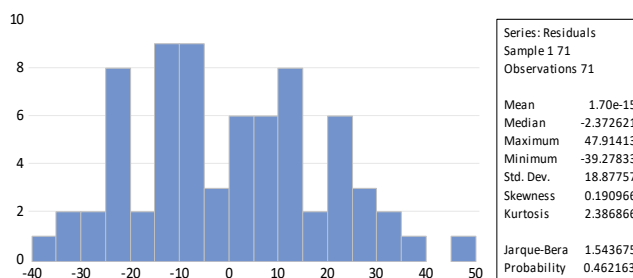
Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui benar atau tidaknya dalam model regresi terdapat hubungan yang signifikan dan representatif. Untuk mengetahui hal tersebut harus memenuhi syarat asumsi klasik. Dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan berdistribusi normal atau tidak, karena data

yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan Teknik analisis regresi berganda. Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar 1 berikut ini:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque-Bera yaitu 0,462163 > dari 0,05 Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data sampel dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Gozali (2018) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan centered VIF seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	252.6925	46.74915	NA
DK	1.716784	7.282713	1.149478
KI	479.3342	17.75635	1.137499
KA	21.15727	40.52005	1.211292
SIA	29.11467	1.593141	1.121931
SR	240.8768	6.112239	1.164056

Pada uji ini dapat dilihat pada tabel Centered VIF nilai $VIF \leq 10$, pada umumnya terjadinya multikolinieritas apabila nilai $VIF \geq 10$. berarti model ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi. Dalam penelitian Ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji White.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0.674335	Prob. F(19,51)	0.8259
Obs*R-squared	14.25551	Prob. Chi-Square(19)	0.7686
Scaled explained SS	8.285092	Prob. Chi-Square(19)	0.9836

Nilai diatas menunjukkan nilai Obs*R-Square mempunyai nilai probabilitas Chi-Square yang tidak signifikan (nilai $p=0,7686$). Dengan demikian maka hipotesis alternatif (Ha) adanya heteroskedastisitas ditolak. Ingat bahwa dalam uji white hipotesis yang diajukan adalah

H0 = tidak ada heteroskedastisitas

Ha = Ada Heteroskedastisitas

Hasil pengujian menunjukkan nilai p yang tidak signifikan sehingga H_a ditolak (tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model).

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Moderating Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	166.2800	54.80834	3.033844	0.0035
DK*	-8.991796	3.293621	-2.730064	0.0082*
KI*	-88.19376	44.96928	-1.961200	0.0544*
KA	3.588212	15.26406	0.235076	0.8149
SIK	-6.935800	5.973841	-1.161028	0.2501
SR*	-253.6722	132.8369	-1.909652	0.0608*
SR*DK	14.96811	9.359840	1.599184	0.1149
SR*KI*	288.2368	129.9657	2.224637	0.0298*
SR*KA	8.373466	30.66635	0.273051	0.7857

Uji Statistik t MRA

Uji t secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Serta untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel moderating *sustainability report* dalam mempengaruhi atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu pengujian ini juga untuk melihat apakah keberadaan variabel moderasi ini sebagai Pure Moderator, Homologizer moderator, Quasi moderator dan Predictor Moderator. Penelitian kali ini menggunakan nilai α sebesar 0,10 atau 10%. Hasil uji T dapat dilihat dari tabel 4.4 diatas. Kesimpulan yang dapat dia ambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti adalah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hipotesis pertama memiliki nilai thitung sebesar -2,7300 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0082 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis pertama diterima, artinya dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti adalah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hipotesis kedua memiliki nilai thitung sebesar -1,961 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0544 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis kedua diterima, artinya komisaris independent memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti adalah jumlah komite audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hipotesis ketiga memiliki nilai thitung sebesar 0,253 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,8149 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis ketiga ditolak, artinya jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Hipotesis keempat yang diajukan oleh peneliti adalah spesialisasi industri KAP memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hipotesis keempat memiliki nilai thitung sebesar -1,161 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,2501 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis keempat ditolak, artinya spesialisasi industri KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Hipotesis kelima yang diajukan oleh peneliti adalah *sustainability report* memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap *audit report lag*. Hipotesis kelima memiliki nilai thitung sebesar 1,599 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,1149 dimana nilai tersebut lebih besar daripada 0,10, maka untuk hipotesis lima ditolak, artinya *sustainability report* tidak mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap *audit report lag*. Berdasarkan hasil analisis, nilai koefisien regresi sebesar 14,96 yang berarti *sustainability report* tidak mempengaruhi dewan komisaris Terhadap *Audit Report Lag*. Dapat disimpulkan bahwa *sustainability report* berfungsi sebagai variabel Prediktor Moderasi dalam pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Audit Report*.

Hipotesis keenam yang diajukan oleh peneliti adalah *sustainability report* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag*. Hipotesis ketujuh memiliki nilai thitung sebesar 2,224 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0298 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis keenam diterima, artinya *sustainability report* mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag*. Berdasarkan hasil analisis, nilai koefisien regresi sebesar 288,23 yang

berarti *sustainability report* memperkuat Komisaris Independent Terhadap Audit Report Lag. Nilai koefisien regresi (β) variabel moderasi (*sustainability report*) dan koefisien regresi (β) interaksi (SR*KI) keduanya bernilai signifikan. Berdasarkan klasifikasi variabel moderasi pada tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa *sustainability report* berfungsi sebagai variabel quasi moderator dalam pengaruh Komisaris Independent Terhadap *Audit Report lag*.

Hipotesis ketujuh yang diajukan oleh peneliti adalah *sustainability report* memoderasi jumlah komite audit terhadap *audit report lag*. Hipotesis kedelapan memiliki nilai thitung sebesar 0,273 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,7857 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis ketujuh ditolak, artinya *sustainability report* tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil analisis, nilai koefisien regresi sebesar 8,373 yang berarti *sustainability report* tidak mempengaruhi komite audit Terhadap *Audit Report Lag*. Dapat disimpulkan bahwa *sustainability report* berfungsi sebagai variabel Homologizer Moderasi dalam pengaruh komite audit Terhadap *Audit Report Lag*.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.330311
Adjusted R-squared	0.243900
S.E. of regression	19.16032
Sum squared resid	22761.30
Log likelihood	-305.5845
F-statistic	3.822543
Prob(F-statistic)	0.001048

Koefisien Determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan regresi.

Dari tabel diatas diperoleh hasil dari Adjusted R-squared (koefisien determinasi) sebesar 0,2439. Angka tersebut menjelaskan Dewan Komisaris (DK), Komisaris Independen (KI), jumlah Komite Audit (KA), Spesialisasi Industri KAP (SIK), *Sustainability Report* (SR), Sustainability Report (SR)* Dewan Komisaris (DK), *Sustainability Report* (SR)* Komisaris Independen (KI), *Sustainability Report* (SR)*jumlah Komite Audit (KA) mampu menjelaskan *Audit Report Lag* (ARL) sebesar 24,39%, sedangkan untuk 75,61% sisanya dapat dijelaskan melalui variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti adalah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis pertama memiliki nilai thitung sebesar -2,730 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0082 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis pertama diterima, artinya dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap audit report lag.

Menurut teori legitimasi dewan komisaris berkaitan dengan bagaimana dewan komisaris memperoleh dan mempertahankan dukungan serta kepercayaan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dan implmentasi kebijakan direksi. Peran dewan komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Ni Kadek Yeni Purnami, Putu Sukma Kurniawan, 2019). (Hilendri et al., 2018) berpendapat semakin banyak anggota dewan komisaris akan mengurangi jangka waktu audit report lag. Dengan adanya pembagian kerja yang baik maka tugas dewan komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi atau manajemen perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan dan nasihat dari dewan komisaris mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, karena merasa diawasi maka manajemen tertuntut untuk taat terhadap aturan, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pinayungan & Hadiprajitno, 2019), (Putri, 2019),

(Maharsa, Agustinus Guntur., Darminto, Dwi Prastowo., & Merawati, 2021), (Irma, 2021), (Ds, 2016), (Hilendri et al., 2018), (Quraizhiy, 2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap audit report lag, sedangkan pada penelitian (Purba, 2018) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap audit report lag.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti adalah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hipotesis kedua memiliki nilai thitung sebesar -1,961 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,054 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis kedua diterima, artinya komisaris independent memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Tugas utama komisaris independen adalah mengawasi dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan taat terhadap aturan. Selain itu komisaris independen tidak hanya melakukan pengawasan melainkan juga memberikan nasihat kepada direksi. Namun tidak ada regulasi yang mengharuskan direksi untuk mendengar saran atau nasihat komisaris independen (Hilendri et al., 2018). Komisaris Independen merupakan komponen penting dari tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi keterlambatan laporan audit dengan menengahi perselisihan antara manajer internal, mengawasi kebijakan manajemen, dan memberi nasihat kepada manajemen (Ode et al., 201). Ukuran komisaris independen yang lebih besar akan mendorong fungsi pengawasan dewan komisaris yang lebih efektif terhadap tindakan oportunistik manajerial. Oleh karena itu, adanya jaminan yang lebih besar atas kebenaran informasi dalam laporan keuangan akan mendorong terhadap semakin berkurangnya audit report lag hal tersebut sejalan dengan penelitian, (Pinayungan & Hadiprajitno, 2019), (Arizky & Purwanto, 2018) (Quraizhiy, 2022), (Bakara & Siagian, 2019), sedangkan pada penelitian (Sidharta & Nurdina, 2017), (Purba, 2018) menyatakan bahwa komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti adalah jumlah komite audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hipotesis ketiga memiliki nilai thitung sebesar 0,235 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,814 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis ketiga ditolak, artinya jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Peran komite audit memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pemilik dari setiap tindakan oportunistik manajemen yang merugikan (Pinayungan & Hadiprajitno, 2019). Memang komite audit tidak berperan langsung dalam penyusunan laporan audit tetapi bertindak sebagai pengawas dalam penyusunan laporan auditor independen, sehingga waktu penerbitan laporan keuangan sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap komite audit di dalam perusahaan. (Bakara & Siagian, 2019). jumlah komite audit yang banyak atau sedikit tidak akan mempengaruhi waktu audit. Keberadaan komite audit di dalam suatu perusahaan bukan menjadi salah satu penentu cepat lambatnya proses audit. Hal ini dapat terjadi jika keberadaan komite audit hanya sebagai alat untuk memenuhi peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.04/2015 (Sulistiani,2022). Oleh karena itu Komite audit tidak dapat mempengaruhi *audit report lag* hal tersebut sejalan dengan penelitian (Hilendri et al., 2018), (Bakara & Siagian, 2019), (Verawati & Wirakusuma, 2016) , (Ds, 2016) ,(Arizky & Purwanto, 2018) sedangkan pada penelitian (Sidharta & Nurdina, 2017), (Putri, 2019), (Quraizhiy, 2022), (Purba, 2018), (Muhammad Amin & Ibnul Jauzi Abdul Caesar, 2021), (Maharsa, Agustinus Guntur., Darminto, Dwi Prastowo., & Merawati, 2021) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap audit report lag.

Spesialisasi Industri KAP terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis keempat yang diajukan oleh peneliti adalah spesialisasi industri KAP memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis keempat memiliki nilai thitung sebesar -1,161 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,250 dimana nilai tersebut lebih dari tbesaringkat signifikansi 0,10, maka untuk

hipotesis keempat ditolak, artinya spesialisasi industri KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag.

Menggunakan KAP spesialisasi industri tidak dapat menghasilkan ARL menjadi lebih cepat apabila perikatan KAP dengan perusahaan klien singkat. Hal itu disebabkan adanya pergantian auditor atau akuntan di dalam KAP. Meskipun KAP menjadi spesialisasi, dengan tenure KAP yang singkat, auditor atau akuntan KAP tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai operasi perusahaan klien. Karami, dkk (2017) menerangkan bahwa dengan adanya rotasi auditor, maka KAP tidak mudah untuk menjadi ahli dan mendapatkan status spesialisasi dalam sebuah industri tertentu. Adanya peraturan yang mengatur terkait jangka waktu penyampaian laporan keuangan auditan dan sanksi administratif yaitu peraturan Peraturan OJK Nomor: 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten Atau Perusahaan Publik. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sampai batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif. Peraturan ini menyebabkan perusahaan yang diaudit oleh KAP spesialis maupun non spesialis akan tetap mendapatkan sanksi administratif apabila mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan. Oleh karena itu, baik KAP spesialis maupun yang non spesialis akan berusaha menyampaikan pelaporan keuangan auditannya secara tepat waktu, sehingga penggunaan jasa KAP spesialis tidak berpengaruh terhadap audit report lag (Rachmah, 2022) sedangkan pada penelitian (Arumningtyas & Ramadhan, 2019) menyatakan bahwa spesialisasi KAP memiliki pengaruh terhadap audit report lag.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag* dengan *Sustainability Report* Sebagai Variabel Moderasi.

Hipotesis kelima yang diajukan oleh peneliti adalah *sustainability report* memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap audit report lag. Hipotesis kelima memiliki nilai thitung sebesar 1,599 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,1149 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis lima ditolak, artinya *sustainability report* tidak mampu memoderasi dewan komisaris terhadap audit report lag.

Dalam POJK 51/POJK.03/2017 BAB IV tentang Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Pelaporan, dan Publikasi Pasal 10 menerangkan bahwa Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya, telah terdapat aturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI untuk membuat *Sustainability report*, tapi belum memiliki hukuman yang tegas bagi yang belum membuatnya (Rangkuti & Yuliantoro, 2019). Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan harus dapat memenuhi harapan dan kepentingan pemangku kepentingan, termasuk dalam penyediaan informasi yaitu *sustainability report* (Madona & Khafid, 2020). Semakin baik tata kelola perusahaan, semakin produktif tindakan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris akan mengurangi jangka waktu audit report lag. Dewan komisaris pada penelitian ini dinilai tidak efektif dalam melakukan mekanisme pengawasan dan mengevaluasi rentang waktu tutup buku perusahaan dengan tanggal dirilisnya laporan auditor independen karena bukan merupakan faktor penentu utama (Purba, 2018).

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag* dengan *Sustainability Report* sebagai Variabel Moderasi.

Hipotesis keenam yang diajukan oleh peneliti adalah *sustainability report* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap audit report lag. Hipotesis keenam memiliki nilai thitung sebesar 2,224 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0298 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis keenam diterima. Berdasarkan hasil analisis, nilai koefisien regresi sebesar 288,23 yang berarti *sustainability report* memperkuat Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag*. Nilai koefisien regresi variabel moderasi (*sustainability report*) dan koefisien regresi interaksi (SR*KI) keduanya bernilai signifikan. Berdasarkan klasifikasi variabel moderasi pada tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa *sustainability report* berfungsi sebagai variabel quasi moderator dalam pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag*.

Sustainability report merupakan tren keperluan bagi suatu perusahaan karena merupakan wujud transparansi perusahaan atas kegiatan operasional. *Sustainability report* adalah cara untuk memperkuat strategi jangka panjangnya yaitu memberikan gambaran umum tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Dengan cara ini, organisasi dapat menetapkan tujuan baru dan mengelola perubahan yang diperlukan, agar dapat diintegrasikan dalam ekonomi global baru yang berkelanjutan, sehingga dapat mempersingkat *audit report lag*. Beberapa pertimbangan yang digunakan auditor dalam memberikan *opini going concern* yaitu *sustainability reporting*, pertumbuhan perusahaan, dan *good corporate governance* (Aditya, 2017). Dengan adanya konsep dimana para auditor juga perlu memberikan opini atas keberlangsungan usaha perusahaan yang diauditnya, maka disinilah sebuah *sustainability report* berperan. Dengan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tentang isu-isu keberlanjutan dan dampak sosial dari perusahaan, komisaris independen dapat lebih efektif dalam mengawasi manajemen dan memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Jika *sustainability report* mengungkapkan isu-isu keberlanjutan yang signifikan atau risiko sosial dan lingkungan yang relevan bagi perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi fokus dan prioritas komisaris independen dalam melakukan pengawasan dan penilaian audit. Mereka mungkin memprioritaskan pengawasan pada area-area yang diungkapkan dalam *sustainability report*. Dengan adanya Komisaris Independen, tidak hanya dapat melindungi kepentingan pihak mayoritas tetapi juga pihak minoritas yang juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan, yang mana salah satu bentuk perlindungan kepentingan tersebut adalah melakukan pelaporan pertanggung jawaban sosial. Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan manajemen, dan bebas dari segala bentuk urusan yang mampu mengganggu independensinya. Melalui adanya Komisaris Independen maka akan tercipta keseimbangan keputusan antara manajemen dan stakeholder, sehingga akan meminimalkan konflik yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan (Aditya, 2017).

Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* dengan *Sustainability Report* Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis ketujuh yang diajukan oleh peneliti adalah *sustainability report* memoderasi pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*. Hipotesis ketujuh memiliki nilai *t* hitung sebesar 0,273 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,7857 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10, maka untuk hipotesis ketujuh ditolak, artinya *sustainability report* tidak mampu memoderasi pengaruh jumlah komite audit terhadap *audit report lag*.

Dalam POJK 51/POJK.03/2017 BAB IV tentang Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Pelaporan, dan Publikasi Pasal 10 menerangkan bahwa Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya. telah terdapat aturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI untuk membuat *Sustainability report*, tapi belum memiliki hukuman yang tegas bagi yang belum membuatnya (Rangkuti & Yuliantoro, 2019). Teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan lebih dari permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diharapkan oleh stakeholder (Fatchan & Trisnawati, 2018). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran Komite Audit kurang menunjang efektifitas kinerja Komite Audit, posisi Komite Audit hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Hasil penelitian juga menunjukkan kurang dipahaminya prinsip *good corporate governance* oleh pelaku bisnis serta kurangnya peran Komite Audit dalam menegakkan prinsip-prinsip *good corporate governance* didukung oleh survei GCG oleh CLSA Asian Pacific Market 2016 yang menempatkan Indonesia di urutan terbawah dalam penerapan prinsip *good corporate governance* (Aditya, 2017).

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris (DK), Komisaris Independen (KI), jumlah Komite Audit (KA), dan Spesialisasi Industri KAP (SIK) berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* (ARL) dan apakah *sustainability report* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh

Dewan Komisaris (DK), Komisaris Independen (KI) dan jumlah Komite Audit (KA) terhadap *audit report Lag*. Oleh karena itu disusunlah tiap hipotesis untuk dilakukan pengujian sehingga dapat diambil kesimpulan terbukti atau tidaknya hipotesis tersebut. Dari hasil pengujian serta pembahasan, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 sehingga semakin banyak anggota dewan komisaris akan mengurangi jangka waktu *audit report lag*. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, maka besar kecilnya komisaris independen akan mengurangi rentang waktu *audit report lag*. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, sehingga banyak sedikitnya anggota komite audit maka tidak akan mengurangi jangka waktu *audit report lag*. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa spesialisasi industri KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, maka besar kecilnya spesialisasi industri KAP tidak akan mengurangi rentang waktu *audit report lag*. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa sustainability report tidak mampu memoderasi dewan komisaris terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, maka besar kecilnya *sustainability report* tidak akan memperkuat hubungan komisaris independen terhadap *audit report lag*. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa sustainability report mampu memoderasi komisaris independen terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, sehingga semakin besar sustainability report maka akan memperkuat hubungan komisaris independen terhadap *audit report lag*. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa *sustainability report* tidak mampu memoderasi komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, maka besar kecilnya *sustainability report* tidak akan memperkuat hubungan komite audit terhadap *audit report lag*.

REFERENSI

- Aditya, M. N. (2017). Pengaruh Sustainability Reporting, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Good *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Audit Going Concern*. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16648>
- Afify, H. A. E. (2009). *Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt*. *Journal of Applied Accounting Research*, 10, 56–86. <https://doi.org/10.1108/09675420910963397>
- Akuntansi, J., & Keuangan, D. A. N. (2018). *No Title*. 2, 1–13.
- Al-Bhoor, A. Y. dan Khamees, B. A. 2016. “*Audit Report Lag, Audit Tenure and Auditor Industry Specialization: Empirical Evidence from Jordan*”. *Jordan journal of Business Administration*, Vol. 12 No. 2, pp. 459-479.
- Al-Juaidi, O., & Al-Afifi, A. A. M. (2016). *The Factors Affecting Timeliness of Corporate Financial Reporting: Empirical Evidence from the Palestinian and Amman Stock Exchange*. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 5(10), 123–135.
- Al Daoud, K. A., Ku Ismail, K. N. I., & Lode, N. A. (2015). *The impact of internal corporate governance on the timeliness of financial reports of jordanian firms: Evidence using audit and management report lags*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(1), 430–442. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1p430>
- Arizky, A. D., & Purwanto, A. (2018). Pengaruh Kualitas Audit , Karakteristik *Corporate Governance* , Kepemilikan Publik , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap *Audit Report Lag* (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017). 7, 1–10.
- Arumningtyas, D. P., & Ramadhan, A. F. (2019). Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor, Reputasi

- Auditor, dan Audit Tenure terhadap *Audit Report Lag*. *Indicators : Journal of Economic and Business*, 1(2), 141–153. <https://doi.org/10.47729/indicators.v1i2.37>
- Bakara, D., & Siagian, H. (2019). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Audit Delay* Pada IDX 30 Tahun 2019. *Jurnal Universitas Advent Indonesia*, 2003(2018), 16–28.
- Darmawang, SE., M.Ak., G., Suratno, S., & Yusuf, M. (2019). Mekanisme *Good Corporate Governance*, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Korelasinya Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(2), 60–70. <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i2.283>
- Diastiningsih, N. P. J., & Tenaya, G. A. I. (2017). Spesialisasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Audit Tenure* Dan Ukuran Kap Pada *Audit Report Lag*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1230–1258. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/25464-1-55634-1-10-20170215.pdf>
- Ds, A. O. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Auditor Eksternal Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia 2011-2013). 59–70.
- Ekonomi, F. (2021). I Wayan Ramantha 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. 1451–1466.
- Febrianti, F., & Bahri, S. (2022). *Analysis of level of social disclosure in sustainability report at PT . Bukit Asam (Persero) Tbk period 2017-2019*. 4(3), 389–396.
- Firdani, F., Widyastuti, T., & Supriyadi., E. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komite Audit, dan Klasifikasi Industri Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada *Consumer Goods Industry* dan Perbankan). Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, 247–260.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.
- Ghozali, I., & Ratmoni, D. (2020). Analisis Multivariate dan Ekonometrik.
- Hakim, L., & Sagiyanti, P. (2018). Hakim dan Sagiyanti, Hal.58-73 *Jurnal JDM*, Vol. I No.02 Sept 2018. *Jurnal JDM*, 1(02), 58–73.
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada PT Herfinta F&P Kebun Aek Batu. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Hendro Lukman, S. (2019). Pengaruh *Sustainability Report* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 477. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.5018>
- Hilendri, B. A., Bambang, B., & Yulia, Y. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Report Lag* Dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 2(1), 121. <https://doi.org/10.29303/jaa.v2i1.13>
- Irma, S. W. O. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Audit report lag* dengan Kompleksitas Audit sebagai Pemoderasi. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, 3(3), 11–11.
- Karami, G., Karimiyan, T., dan Salati, S. 2017. “*Auditor Tenure, Auditor Industry Expertise, And Audit Report Lag: Evidences of Iran*”. *Iranian Journal of Management Studies (IJMS)*, Vol.10 No. 3, pp. 641-666.
- Kuswanto, R. (2019). Penerapan Standar Gri Dalam Laporan Keberlanjutan Di Indonesia: Sebuah Evaluasi. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(2), 1–21. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i2.59>
- Lee, H.-Y., Mande, V., & Son, M. (2009). *Do Lengthy Auditor Tenure and the Provision of Non-Audit Services by the External Auditor Reduce Audit Report Lags?* *International Journal of Auditing*, 13, 87–104. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00406.x>
- Maharsa, Agustinus Guntur., Darminto, Dwi Prastowo., & Merawati, E. E. (2021). Peran Moderasi Ukuran Perusahaan Terhadap Determinan *Audit Delay*. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 06(02), 120–137.

- Makhabati, D. N. E., & Adiwibowo, A. S. (2019). Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor, Reputasi KAP & *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Manurung, D. T. H. (2017). Pentingkah *Good Corporate Governance* Bagi *Audit Report Lag*? 204, 137–148.
- Moderasi, S. V. (2022). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*. 8(November), 119–129.
- Mohamad-Nor, M. N., Shafie, R., & Wan-Hussin, W. N. (2010). *Corporate governance and audit report lag in Malaysia*. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 57–84.
- Monica, A., Auditor, S. I., Tenure, A., Informasi, A., & Perusahaan, K. O. (2023). *Universitas Ma Chung e-mail: 10(1)*, 46–59.
- Muhammad Amin, & Ibnul Jauzi Abdul Caesar. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Auditor Eksternal Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2013-2015). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 40–50. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.505>
- Mutmainah, K. (2022). Determinan *Audit Report Lag* Dengan Efektivitas Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Diponegoro Journal*, 11, 1–13.
- Naranjo, J., Fuad, H., Hakim, Z., Panchadria, P. A., Robbi, M. S., Yulianti, Y., Susanti, E., Sholeh, M., Teuku Fadjar Shadek, R. S., Kamil Arif, I., Gunadhi, E., Partono, P., Sampieri, R. H., & Pariyatin, Y. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Jurnal Algoritma*, 12(1), 579–587. <http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan-weblog>
- Nehme, R., Assaker, G., & Khalife, R. (2015). Dynamics of audit lag – *Board of directors and audit committees' effect*. *Corporate Ownership and Control*, 12(3CONT3), 281–294. <https://doi.org/10.22495/cocv12i3c3p1>
- Ni Kadek Yeni Purnami, Putu Sukma Kurniawan, M. A. W. (2019). Pengaruh Jenis Industri, Laba dan Rugi Operasi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Kecendrungan Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10, 49–60.
- Nur Fitri, I., & Dudy Satyawan, M. (2014). *Analysis of Sustainability Report on Going Concern Audit Opinion on Manufacturing Company Listed in Bei*. *3rd Economics & Business Research Festival, November*, 1804–1830.
- Ode, W., Sari, I., Subroto, B., & Ghofar, A. (2019). Penelitian dalam Ilmu Bisnis & Ilmu Sosial Mekanisme tata kelola perusahaan dan keterlambatan laporan audit dimoderasi oleh kompleksitas audit. 8(6), 256–261.
- Oktaviani, S. M., Darminto, D. P., & Djaddang, S. (2023). Dampak *Sustainability Reporting* dan Determinan *Audit Delay*. 7(April), 1213–1225.
- Pinayungan, I. K., & Hadiprajitno, P. B. (2019). Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Audit Report Lag*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Prasetyo, Y., Ahmar, N., & Syam, M. A. (2020). Determinan *Audit Report Lag* dan Peran Auditor Spesialisasi Industri Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 7(1), 119–136.
- Purba, D. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Struktur *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap *Audit Delay*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 009–022. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.59>
- Putri, G. A. (2019). Kontribusi *Good Corporate Governance* Untuk Mengurangi Terjadinya *Audit Delay*. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 78–88. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v4i2.2401>

- Qudriyah, H. L., Hastuti, Burhany, D. I., & Sumardi, S. (2021). *An Analysis of Sustainable Finance Disclosure at Indonesian Sharia Commercial Banks using POJK 51/POJK.03/2017 Its Determinants and Influence on the Profitability*. *Advances in Engineering Research*, 207(Issat), 544–551.
- Quraizhiy, F. (2022). Pengaruh *Corporate Governance*, Kompleksitas Operasi dan Kepemilikan Asing Terhadap *Audit Delay* dengan Implementasi IFRS sebagai Variabel Moderasi. 8(3), 3583–3600.
- Rachmah, R. E. N. (2022). Pengaruh *Audit Tenure*, Spesialisasi Industri KAP dan Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay*. *Accounting Student Research Journal*, 1 (1)(1), 97.
- Rangkuti, H. A., & Yuliantoro, H. R. (2019). Lebih Penting Mana *Sustainability Report* Atau Laba Bagi Perusahaan Perkebunan? 10(1), 365–378.
- Ratnaningsih, N. M. D., & A.A.N.B.Dwinandra. (2016). Spesialisasi Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh *Audit Tenure* Dan Pergantian Auditor Pada *Audit Delay*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 18–44.
- Salleh, Z., Baatwah, S. R., & Ahmad, N. (2017). *Audit Committee Financial Expertise and Audit Report Lag: Malaysia Further Insight*. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8, 137–150. <https://doi.org/10.17576/ajag-2017-08-12>
- Saputra, M. I., & Agustin, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Good Corporate Governace* (GCG), dan Kualitas Audit Terhadap *Audit Delay*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 364–383. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.366>
- Setiawan, D., & Kurniasih, N. C. (2020). Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Satwa Prima Utama. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(April), 55–64.
- Sidharta, R. Y., & Nurdina. (2017). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya Di Bursa Efek Indonesia. *Management & Accounting Research Journal Global*, 2(1), 1–8. <http://stieus.ejournal.web.id/index.php/stieus/article/view/107>
- Supadi, Y. M., & Sudana, I. P. (2018). Pengaruh Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 1165. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p09>
- Verawati, N. M. A., & Wirakusuma, M. G. (2016). Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi Kap, Opini Audit, Dan Komite Audit Dalam *Audit Delay*. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1083–1111.
- Verawati, N., & Wirakusuma, M. (2016). Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi Kap, Opini Audit, Dan Komite Audit Dalam *Audit Delay*. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1083–1111.
- Wirotomo, B., & Achmad, T. (2018). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Audit Report Lag*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–10.